PNI dan Politik Inklusif: Membangun Gerakan Nasional Anti Kolonial di Indonesia (1928-1931)

Saripulloh, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Zaenal Abidin, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
N. Erna Marlia Susfenti, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

erna.marlia@uinbanten.ac.id

Received: 25 Mei 2025
Accepted: 28 Juli 2025
Published: 29 Juli 2025

Copyright@2025 (authors)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Abstract

This study examines the role of the Indonesian National Party (PNI) in developing an anti-colonial national movement through an inclusive political approach during the 1928–1931 period. Using historical research methods and primary sources such as colonial archives, the newspaper Persatoean Indonesia, and party documents. This research reveals how PNI successfully created a struggle strategy that involved various societal layers, including intellectuals, laborers, women, and youth. The findings indicate that PNI implemented inclusive politics through: (1) establishing branch networks across regions, (2) organizing boycotts against colonial institutions, (3) conducting political education and cadre training programs, and (4) strategic collaboration with other national movement elements. The newspaper Persatoean Indonesia played a crucial role in disseminating unity ideology and mobilizing mass support. The impact of this approach is evident in the formation of the political federation PPPKI and the repressive response from the colonial government, which ultimately dissolved PNI in 1931. Nevertheless PNI's legacy of inclusive politics lived on through its successor parties, laying a vital foundation for Indonesia's independence struggle. This study concludes that PNI's inclusiveness was not merely a strategy but a tangible manifestation of national unity that transcended ideological and social divisions.

Keywords: *PNI, Inclusive Politics, National Movement, Colonialism*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran Partai Nasional Indonesia (PNI) dalam mengembangkan gerakan nasional anti-kolonial melalui pendekatan politik inklusif pada periode 1928–1931. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah dan sumber-sumber primer seperti arsip kolonial, surat kabar Persatoean Indonesia, serta dokumen partai. Penelitian ini mengungkap bagaimana PNI berhasil menciptakan strategi perjuangan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk intelektual, buruh, perempuan, dan pemuda. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PNI menerapkan politik inklusif melalui: (1) pembentukan jaringan cabang di berbagai daerah, (2) gerakan boikot terhadap lembaga kolonial, (3) penyelenggaraan pendidikan politik dan kursus kader, serta (4) kolaborasi strategis dengan elemen pergerakan nasional lainnya. Surat kabar Persatoean Indonesia berperan penting dalam menyebarkan ideologi persatuan dan memobilisasi massa. Dampak dari pendekatan ini terlihat dari terbentuknya federasi politik

PPPKI dan respons represif pemerintah kolonial yang akhirnya membubarkan PNI pada 1931. Namun warisan politik inklusif PNI terus hidup melalui partai penerusnya, menjadi fondasi penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa inklusivitas PNI bukan sekadar strategi, melainkan bentuk nyata dari semangat persatuan nasional yang melampaui sekat-sekat ideologis dan sosial.

Kata kunci: *PNI, Politik Inklusif, Gerakan Nasional, Kolonialisme*

A. PENDAHULUAN

Pergerakan nasional di Indonesia berlangsung pada kurun waktu 1908-1945 yang ditandai dengan tumbuhnya kesadaran nasional di kalangan penduduk pribumi, khususnya kaum terpelajar pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang saat itu menerapkan kebijakan politik etis (irigasi, edukasi, dan emigrasi).[1] Golongan terpelajar inilah yang kemudian berperan sebagai penggerak utama dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Tanda awal dari munculnya kesadaran nasional dapat dilihat dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908[2] yang kemudian disusul oleh pembentukan organisasi-organisasi pergerakan lainnya seperti Sarekat Islam (1911) dan Indische Partij (1912).

Memasuki dekade 1926–1927 pergerakan nasional Indonesia mengalami fase yang lebih radikal. Kegagalan pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada periode tersebut menimbulkan kesadaran akan perlunya pembentukan wadah baru yang mampu menyalurkan aspirasi rakyat secara lebih efektif, mengingat organisasi-organisasi yang telah ada dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut.[3] Di sisi lain sejumlah kelemahan fundamental turut menghambat laju perjuangan nasional seperti konflik antarorganisasi, rivalitas antarpemimpin, perbedaan ideologi, serta terjadinya kesenjangan antara elite dan massa berbagai faktor ini berkontribusi pada melemahnya gerakan kebangsaan secara menyeluruh.[4]

Partai Nasional Indonesia (PNI) didirikan pada tahun 1927 oleh sejumlah tokoh pergerakan nasional di antaranya Soekarno, Dr. Tjipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Iskaq Tjokrohadisurjo, Sunario, Dr. Samsi, dan Mr. Budiarto.[5] Tujuan utama PNI adalah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara penuh dari penjajahan Belanda. Untuk mencapai tujuan tersebut PNI menganut asas berdiri di atas kekuatan sendiri yang dimaknai sebagai upaya kolektif untuk mewujudkan perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk politik, sosial, dan ekonomi, dengan mengandalkan potensi, semangat, serta daya juang rakyat Indonesia sendiri tanpa keterlibatan atau kompromi dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda.[6]

---

[1] Yusuf Perdana and Adi Rinaldo Pratama, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, *Lakeisha*, 2022, 5.

[2] Budiharja et al., "Budi Utomo: Sjarah dan Kongres Pertama di Yogyakarta 1908",Sebuah Kajian Koleksi Museum Benteng Vrederbug Yogyakarta", (Yogyakarta: Museum Benteng Vredebrug Yogyakarta, 2004), 1.

[3] Tim Penulisan Searah Nasional Indonesia, *Sejarah Nasioal Indonesia; Zaman Kebangkitan Nasional Dan Masa Hindia Belanda*, Edisi Ketu (Jakarta: Balai Pustaka, 2019), 366.

[4] Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonilaisme Sampai Nasionalisme*, Jilid 2 (Jakarta: Gramedia, 1993), 153.

[5] J.Petrus Blumberger, *De Nationalistische Beweging In Nederlandsch Indie* (Hollad: Foris Publication, 1987), 206.

[6] Mawardi Kholid and Hidayat Imam, *Relasi Sosial Politik Nahdlatul Ulama*, Cetakan I (Jawa Tengah: Rizquna Anggota IKAPI, 2023), 134.

Asas tersebut mencerminkan semangat kemandirian nasional sekaligus mencerminkan pendekatan yang inklusif, yakni melibatkan seluruh lapisan masyarakat baik dari kalangan elite terpelajar maupun rakyat kebanyakan, dalam proses perjuangan kemerdekaan. Dengan demikian, PNI bukan hanya hadir sebagai organisasi politik elitis, tetapi sebagai gerakan kebangsaan yang membuka ruang partisipasi luas bagi semua golongan untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia merdeka.

Implementasi politik inklusif yang dijalankan oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) tercermin melalui berbagai aktivitas sosial dan edukatif, seperti penyelenggaraan pendidikan politik, kursus pemberantasan buta huruf, pendirian taman baca dan koperasi, penyediaan layanan kesehatan melalui klinik rakyat, penyelenggaraan rapat umum, serta penerbitan media massa. Salah satu media yang digunakan adalah surat kabar Persatoean Indonesia yang berperan penting dalam menyebarluaskan ide nasionalisme, membangkitkan kesadaran politik rakyat, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu melawan kolonialisme Belanda.[7]

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengkaji strategi politik inklusif PNI dengan menelusuri bagaimana partai ini dibentuk sebagai wadah perjuangan yang terbuka bagi seluruh kalangan masyarakat; kedua, menganalisis implementasi dari strategi politik inklusif tersebut yang mencakup penguatan basis massa di daerah, gerakan boikot, kemandirian politik berbasis nonkooperatif, pelaksanaan rapat umum dan propaganda, pendidikan politik, kolaborasi strategis PNI dengan elemen-elemen pergerakan nasional lainnya, serta penyebaran ideologi melalui Surat Kabar Persatoean Indonesia; dan ketiga, mengevaluasi dampak dari pendekatan inklusif PNI, mulai dari pembentukan federasi politik seperti PPPKI (1927), respons represif pemerintah kolonial terhadap tokoh-tokoh PNI, hingga warisan penting berupa semangat persatuan nasional setelah pembubaran partai ini pada tahun 1931.

Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat mengungkap secara komprehensif peran sentral PNI dalam memperkuat gerakan kebangsaan melalui pendekatan inklusif yang menjadi fondasi penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul "PNI dan Politik Inklusif: Membangun Gerakan Nasional Anti-Kolonial di Indonesia (1928–1931)" menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah. Menurut Murdiyanto penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk kuantifikasi lainnya. Senada dengan itu, Strauss dan Corbin menjelaskan bahwa pendekatan kualitaatif dapat digunakan untuk meneliti fenomena sosial seperti kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, dinamika organisasi, gerakan sosial, serta hubungan sosial dan budaya dalam masyarakat.[8]

Dalam penelitian ini, metode sejarah digunakan sebagai landasan utama. Metode sejarah berfungsi sebagai panduan sistematis dalam merekonstruksi peristiwa masa lalu secara ilmiah. Proses dalam metode sejarah melibatkan beberapa tahapan

[7] Sartono, "Ma'loemat Kepada Ra'Jat Pendoedoek Jacatra dan Sekelilingnja dari Pengoeroes PNI Tjabang Jacatra" (1930).

[8] Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif), YogyakartaPress,2020,http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx.

penting, yakni pengumpulan dan penelusuran sumber (heuristik), verifikasi keabsahan dan kredibilitas sumber (kritik sumber), penafsiran makna dari fakta sejarah (interpretasi), dan penyusunan narasi sejarah secara sistematis (historiografi). Keempat tahapan ini menjadi acuan utama dalam penulisan sejarah yang berbasis data dan analisis mendalam.[9]

Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa teks, narasi lisan, serta aktivitas sosial-politik yang dapat diamati dan ditelusuri secara historis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dengan menelaah beragam sumber tertulis seperti buku, surat kabar, majalah, arsip, dan dokumen historis lainnya. Sumber primer dalam penelitian ini mencakup salinan surat dari *Procureur-Generaal* (Jaksa Agung) kepada *Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië* (Gubernur Jenderal Hindia Belanda), berisi laporan aktivitas klub debat yang diselenggarakan oleh PNI, Maklumat dari Mr. Sartono (Ketua PNI Cabang Jakarta) terkait penangkapan Soekarno tahun 1930, dan surat kabar Persatoean Indonesia yang terbit di Batavia antara tahun 1928 hingga 1931.

Selain itu digunakan pula literatur sejarah seperti karya J. Petrus Blumberger berjudul *De Nationalistische Beweging in Nederlandsche Indie* (1987), John Ingleson dalam *Jalan ke Pengasingan* (1988), Sartono Kartodirdjo dalam *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Baru Jilid II* (1990), buku *Sejarah Bangsa Indonesia Jilid V* terbitan Balai Pustaka (2008), dan *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia* karya Cindy Adams (1966).

Adapun sumber sekunder diperoleh dari buku-buku pendukung lainnya serta artikel-artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional dan internasional terakreditasi. Seluruh data dan referensi tersebut digunakan untuk mengkaji secara mendalam dinamika gerakan politik inklusif yang dibangun oleh Partai Nasional Indonesia dalam menghadapi kolonialisme Belanda pada periode 1928–1931.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Inklusif Partai Nasional Indonesia

Istilah inklusif memiliki cakupan makna yang luas. Secara umum inklusivitas merujuk pada adanya kesetaraan hak individu dalam mengakses dan memperoleh berbagai sumber daya penting, seperti dalam bidang politik, pendidikan, sosial, maupun ekonomi. Keempat aspek ini tidak berdiri sendiri tetapi saling terhubung dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Berdasarkan pandangan Reid istilah inklusif berkaitan dengan berbagai aspek hidup manusia yang didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan pengakuan atas hak individu.[10]

Reza A.A. Wattimena berpendapat bahwa politik inklusif dapat dimaknai sebagai terbukanya ruang partisipasi politik bagi seluruh golongan. Perbedaan cara berpikir dan gaya hidup tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan sesuatu yang perlu dihargai dan dikembangkan. Pandangan politik inklusif bersifat luas atau kosmik, artinya melihat kepentingan dari sudut pandang yang lebih menyeluruh, bukan hanya dari perspektif kelompok tertentu yang sempit. Politik inklusif juga menolak segala bentuk intoleransi. Kelompok-kelompok yang menolak perbedaan dan bersikap eksklusif tidak dapat hidup dalam kerangka politik yang inklusif. Dalam pengertian ini politik inklusif juga menolak kehadiran agama kematian, suatu istilah yang merujuk pada ideologi tertutup yang menolak dialog, keberagaman, serta kehidupan yang dinamis. Oleh karena itu, politik inklusif menegaskan pentingnya

[9] Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah; Metode Dan Praktik* (Gresik: JSI Press, 2020).

[10] Hasan Baharun and Robiatul Awwaliyah, "Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Epistemologi Islam," *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 5, no. 1 (2018): 59.

keterbukaan dan kebebasan berpikir dalam membangun kehidupan berbangsa yang adil dan setara.[11]

Dalam dinamika pergerakan nasional Indonesia, prinsip politik inklusif menemukan perwujudan nyatanya melalui pendekatan yang dijalankan oleh Partai Nasional Indonesia (PNI). Pada awal abad ke-20 gerakan kebangsaan masih terfragmentasi oleh batas-batas kelas sosial, etnis, dan ideologi. Organisasi seperti Boedi Oetomo yang merepresentasikan kaum priyayi Jawa, maupun Sarekat Islam yang mewadahi para pedagang Muslim, menunjukkan kecenderungan eksklusivitas dalam orientasi perjuangannya. Kondisi ini mengalami perubahan pasca pemberontakan PKI tahun 1926 dan pembubaran partai tersebut oleh pemerintah kolonial, yang menimbulkan kesadaran akan pentingnya strategi perjuangan yang lebih inklusif dan mampu merangkul berbagai lapisan masyarakat, mulai dari buruh, petani, intelektual, hingga perempuan.

Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan pada 4 Juli 1927 oleh Soekarno bersama tokoh-tokoh seperti Tjipto Mangunkusumo, Soedjono, Iskaq Tjokrohadisurjo, Budiarto, dan Sunarjo, muncul sebagai pelopor penerapan politik inklusif dalam perjuangan kemerdekaan. PNI menegaskan komitmennya terhadap kemerdekaan Indonesia melalui gerakan rakyat yang mandiri, sadar politik, serta terbuka terhadap kerja sama dengan organisasi lain yang memiliki visi sejalan. Pendekatan ini menunjukkan karakter inklusif PNI yang tidak membatasi diri pada satu kelompok atau ideologi tertentu, melainkan mendorong partisipasi politik dari seluruh elemen masyarakat.[12]

Landasan ideologis strategi inklusif PNI berakar pada pemikiran visioner Soekarno, khususnya dalam karya monumentalnya "Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme". Melalui tulisan ini Soekarno mengkritik pertentangan ideologis yang terjadi di kalangan pergerakan dan menawarkan perpaduan antara tiga arus pemikiran besar tersebut. Ia menegaskan bahwa ketiga ideologi ini bukanlah kekuatan yang saling bertentangan, melainkan potensi sinergis yang dapat membentuk "*ombak-taufan*" dahsyat bagi perjuangan kemerdekaan apabila dapat dipadukan secara harmonis.[13]

Visi inklusif yang ditawarkan oleh Soekarno ini mencerminkan paradigma baru dalam perjuangan nasional, yaitu menempatkan persatuan di atas perbedaan ideologis. Dalam program dasarnya PNI menekankan bahwa kemerdekaan politik merupakan syarat utama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat. Untuk mencapai hal tersebut PNI merancang program-program konkret di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan yang berorientasi nasional. Prinsip Nonkoopertif terhadap pemerintah kolonial tidak menjadikan PNI tertutup terhadap jaringan solidaritas dengan organisasi rakyat lainnya. Sebaliknya, sikap ini mempertegas komitmen PNI dalam membangun sistem politik yang benar-benar representatif dari, oleh, dan untuk rakyat. Pendekatan inklusif yang dijalankan PNI ini menjadi bukti historis bahwa inklusivitas bukan sekadar konsep melainkan strategi nyata dalam membangun kekuatan anti-kolonial yang melampaui sekat-sekat ideologi, agama, dan kelas sosial.[14]

---

[11] Reza A.A Wattimena, "Politik Progresif Inklusif Sebuah Teori," *RumahFilsafat.Com*, no. April (2024): 10.

[12] Blumberger, *De Nationalistische Beweging In Nederlandsch Indie*.

[13] Ir. Soekarno, *Nasionalisme,_Islamisme,_dan_Marxisme.Pdf* (Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1963), 6.

[14] Blumberger, *De Nationalistische Beweging In Nederlandsch Indie*.

Implementasi Politik Inklusif

Setelah resmi berdiri pada tahun 1927 Partai Nasional Indonesia (PNI) tidak hanya berfungsi sebagai partai politik, tetapi juga berkembang menjadi sebuah gerakan rakyat yang menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Puncak dari transformasi ini terjadi pada tahun 1928 ketika PNI menyelenggarakan kongres pertamanya dan secara resmi mengubah bentuk organisasinya dari sebuah perserikatan menjadi partai politik. Perubahan tersebut mencerminkan kematangan organisasi serta komitmennya dalam perjuangan politik nasional, yang selanjutnya mendorong upaya konsolidasi kekuatan rakyat secara lebih terorganisir. Melalui strategi politik yang bersifat inklusif, PNI membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi berbagai lapisan masyarakat, mulai dari kalangan intelektual, buruh, perempuan, hingga pemuda. Adapun berbagai kegiatan yang merepresentasikan strategi inklusif tersebut antara lain meliputi:

1. Membangun Kekuatan dari Daerah

Partai Nasional Indonesia (PNI) mulai mengorganisir diri secara bertahap sejak Juli 1927 dengan mendirikan cabang-cabang di berbagai kota. Selain Bandung sebagai pusat, PNI membentuk cabang di Yogyakarta pada Juli 1927 di bawah pimpinan Sujudi, lalu di Batavia (Jakarta) pada November 1927 yang dipimpin Sartono, dan terakhir di Surabaya pada Februari 1928 dengan Ruslan Wongsokusumo sebagai ketua dan Anwari sebagai sekretaris.[15]

Perkembangan PNI mencapai puncaknya saat menyelenggarakan Kongres Pertama di Surabaya pada 27-30 Mei 1928 yang dihadiri sekitar 1.000-1.500 peserta. Kongres ini menjadi momen penting untuk merumuskan program partai yang berfokus pada tiga tujuan utama: memperjuangkan kemerdekaan dari Belanda, membangun negara nasional, dan mengandalkan kekuatan sendiri karena Belanda dinilai tidak akan melepaskan Hindia Belanda secara sukarela. Untuk mewujudkannya, PNI menetapkan tiga strategi yaitu perjuangan politik (meningkatkan kesadaran nasional dan persatuan), pembangunan ekonomi, dan penguatan pendidikan nasional. PNI meyakini bahwa dengan membangkitkan semangat nasional akan tercipta kemauan kolektif yang pada akhirnya mendorong aksi nyata menuju kemerdekaan.[16]

2. Boikot Lembaga Belanda

Boikot terhadap lembaga kolonial Belanda menjadi strategi utama Partai Nasional Indonesia (PNI) dalam perjuangan kemerdekaan. PNI percaya bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa diraih dengan membangun institusi mandiri yang terbebas dari pengaruh penjajah. Oleh karena itu mereka menolak berkolaborasi dengan badan-badan kolonial seperti Volksraad yang dianggap sebagai alat legitimasi Belanda. Sebagai gantinya PNI membangun institusi alternatif seperti sekolah, klinik, koperasi, dan bank nasional sebagai upaya menuju kemandirian politik dan ekonomi.

Strategi ini diperkuat dengan konsep "*Negara dalam Negara*" di mana PNI membangun struktur pemerintahan paralel sebagai persiapan menggantikan sistem kolonial. Langkah ini tidak hanya mempersiapkan kemerdekaan secara institusional, tetapi juga memperkuat posisi PNI sebagai pelopor pergerakan nasional. Laporan Kieviet de Jonge pejabat Hindia Belanda, mengonfirmasi bahwa PNI dan gerakan nonkooperatif secara konsisten menolak keterlibatan dalam pemerintahan kolonial.

[15] Ingleson John, *Jalan Ke Pengasingan;Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*, Cetakan Ke (Jakarta: LP3S Anggota IKPI, 1988), 36.

[16] Blumberger, *De Nationalistische Beweging In Nederlandsch Indie*.

Mereka fokus pada pemberdayaan kaum intelektual pribumi untuk menciptakan kemandirian tanpa bergantung pada Belanda.

Gagasan ini terinspirasi oleh gerakan Sinn Féin di Irlandia, dengan semangat *swadeshi* (kemandirian ekonomi) sebagai landasan utamanya. Sejak 1926, para pemimpin nonkooperatif telah memprioritaskan pendirian koperasi, sekolah, dan serikat buruh sebagai langkah konkret menuju kemandirian nasional. Melalui pendekatan ini, PNI tidak hanya menentang kolonialisme secara politik, tetapi juga membangun alternatif nyata untuk menggantikan sistem penjajahan secara berkelanjutan.

3. Rapat Umum dan Propaganda

Rapat umum propaganda menjadi setrategi ampuh Partai Nasional Indonesia (PNI) dalam menyebarkan semangat kemerdekaan dan menanamkan prinsip-prinsip non-kooperasi di tengah masyarakat. Melalui rapat-rapat ini PNI berusaha membangkitkan kesadaran politik rakyat dan menggalang dukungan luas terhadap perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Rapat umum bukan hanya sekadar sarana untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi alat untuk memobilisasi massa dan menginspirasi rakyat Indonesia agar terlibat aktif dalam perjuangan. Dengan demikian, rapat-rapat umum propaganda PNI memainkan peran sentral dalam memperkuat gerakan kemerdekaan dan memperluas jangkauan pengaruh partai di seluruh Indonesia.

Sepanjang tahun 1928 para pemimpin PNI aktif mengadakan perjalanan ke berbagai wilayah di Pulau Jawa, berpidato di rapat-rapat umum, dan mendorong cabang-cabang PNI untuk bekerja lebih keras. Rapat umum sering diadakan di gedung bioskop dengan tujuan membangkitkan semangat rakyat. Suasana rapat diperkuat dengan hiasan gambar pahlawan nasional seperti Pangeran Diponegoro dan Ki Hadjar Dewantara, serta karangan bunga merah putih dan bendera PNI yang menghiasi podium. Salah satu momen yang paling dinantikan oleh masyarakat adalah pidato Soekarno.[17]

Para pemimpin PNI seperti Soekarno, Sartono, dan Iskaq Tjokrohadisoerjo secara sistematis menyampaikan tiga pesan inti: penentangan terhadap kolonialisme, prinsip non-kooperasi dan kemandirian, serta persatuan nasional dan solidaritas Asia. Soekarno kerap menggambarkan imperialisme Belanda sebagai "Kyai Blorong" (ular naga mitos yang rakus) yang mengeksploitasi sumber daya Indonesia, sementara narasi sejarah penjajahan digunakan untuk membangkitkan kemarahan rakyat.

Kepopuleran rapat-rapat umum yang diadakan oleh PNI tidak bisa dilepaskan dari sosok kharismatik Soekarno. Pidato-pidatonya yang menggugah sangat memikat hati rakyat. Bahasa yang digunakan Soekarno yang kaya akan unsur pewayangan dan konsep tradisional, membuatnya mudah dipahami oleh masyarakat luas. Dengan gaya bicara yang menarik dan semangat yang membara, Soekarno berhasil menyulut antusiasme rakyat. Selain itu, kewibawaan yang dimilikinya sangat berpengaruh dalam membangkitkan kesadaran nasional dan menanamkan semangat persatuan Indonesia.[18]

Soekarno sebagai pemimpin kharismatik, juga menekankan pentingnya persatuan di atas perbedaan. Dalam pidato-pidatonyaia sering mengajak rakyat untuk mengesampingkan prasangka kesukuan dan kedaerahan, serta fokus pada tujuan bersama yaitu kemerdekaan Indonesia. Pendekatan inklusif ini tidak hanya

[17] Blumberger.

[18] Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonilaisme Sampai Nasionalisme*.

memperkuat solidaritas nasional, tetapi juga menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang adil dan merdeka.

4. Pendidikan Rakyat dan Kursus Kader

Partai Nasional Indonesia (PNI) secara gencar melaksanakan penyebaran gagasan perjuangan di berbagai daerah, dengan penekanan khusus pada wilayah pedesaan dan perkotaan di Jawa. Tidak hanya itu, PNI juga secara aktif menargetkan kelompok-kelompok penting seperti serikat pekerja, organisasi pemuda, dan institusi pendidikan untuk menyampaikan pandangan politik dan cita-cita perjuangan mereka. Dengan strategi ini, PNI berhasil menggapai berbagai kalangan masyarakat dan meningkatkan pemahaman politik rakyat.

Pada November 1928 PNI Cabang Bandung menjadi pelopor dengan menyelenggarakan program kursus mingguan di berbagai kampung.[19] Kegiatan pendidikan ini dikelola langsung oleh pengurus cabang PNI setempat dan menyajikan beragam materi pembelajaran, termasuk keaksaraan dasar, pengajaran bahasa asing, pengetahuan hukum, serta ilmu-ilmu sosial. Inisiatif positif ini mendapat sambutan hangat dari cabang-cabang PNI lainnya di Yogyakarta, Batavia, dan Surabaya, yang kemudian segera mengadopsi model serupa. Program ini tidak sekadar memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran politik yang lebih mendalam.[20]

Kursus-kursus tersebut terbukti menjadi media yang ampuh bagi PNI untuk menyebarluaskan ideologi perjuangan sekaligus memperkokoh dukungan di tingkat masyarakat bawah. Dengan menyediakan pendidikan yang terjangkau dan mudah diakses, PNI sukses menarik perhatian masyarakat, khususnya dari golongan menengah ke bawah, untuk berpartisipasi aktif dalam pergerakan kemerdekaan.

Sebagai pelengkap program pendidikan, PNI pun membentuk klub-klub debat yang rutin mengadakan pertemuan dua mingguan. Forum-forum tertutup ini semakin populer di kalangan masyarakat dan memiliki tujuan khusus: memperkenalkan nilai-nilai, sasaran, dan visi PNI kepada anggota maupun calon anggota, sekaligus mencetak kader-kader pemimpin yang kompeten.[21]

Melalui kombinasi program kursus dan klub debat PNI berhasil menggerakkan massa dan menyiapkan pemimpin-pemimpin yang mampu menguatkan partai di berbagai daerah. Berbagai kegiatan ini tidak hanya berfungsi meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anggota, tetapi juga berperan penting dalam mempererat rasa persatuan dan menumbuhkan semangat juang di antara para kader PNI.

5. Strategi Kolaboratif PNI dengan Elemen Pergerakan

Sebagai salah satu organisasi politik terkemuka dalam pergerakan nasional, Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalin hubungan strategis tidak hanya dengan organisasi besar seperti Budi Utomo dan Partai Sarekat Islam Indonesia, tetapi juga secara aktif membangun kerja sama dengan tiga pilar utama masyarakat: pemuda, perempuan, dan buruh. Pendekatan multidimensi ini bertujuan memperluas basis

---

[19] Pardi Wayan et al., "Rekonstruksi Pemikiran-Pemikiran Sukarno Tentang Toleransi Tahun 1926-1966 dan Relevansinya Pada Masyarakat Indonesia Di Era Abad Xxi," Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 09 (2023): 1519, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/73691.

[20] John, *Jalan Ke Pengasingan;Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*.

[21] Zijne Excollontio Den Gouverneur-, "Afschrift, Parket van Den Procureur-Generaal, No. 2339/AP, Weltevreden, 22 Desember 1928, SPOED, Onderwerp: GEHEIM - EIGENHANDIG, Cursus-En Ledenvergaderingen Der PNI," 1928.

dukungan sekaligus meningkatkan kesadaran politik masyarakat dalam melawan kolonialisme.

PNI memainkan peran sentral dalam membangun kesadaran kebangsaan di kalangan pemuda melalui tokoh-tokoh utamanya. Soekarno, Soenario, dan Sartono menjadi motor penggerak organisasi Pemuda Indonesia sejak pendiriannya tahun 1928 dengan jaringan yang cepat meluas ke pusat-pusat pergerakan seperti Yogyakarta, Solo, dan Surabaya.[22] Puncak kontribusi PNI terwujud dalam Kongres Pemuda Indonesia Kedua Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda.[23] Dalam forum bersejarah ini, Sartono menekankan pentingnya persatuan nasional yang harus meresap hingga ke lapisan masyarakat paling bawah di pedesaan, sementara Soenario mengembangkan wacana tentang gerakan kepanduan sebagai media pendidikan karakter kebangsaan. Pandangan visioner ini menunjukkan komitmen PNI terhadap pembinaan generasi muda sebagai investasi jangka panjang bangsa.[24]

PNI menunjukkan dukungan kuat terhadap gerakan perempuan dengan mendukung penyelenggaraan Kongres Perempuan Pertama di Yogyakarta pada Desember 1928, yang melahirkan Perserikatan Perempuan Indonesia (PPI). Partai ini konsisten mendorong peran aktif perempuan dalam pergerakan nasional, menganggap mereka setara dengan laki-laki dalam perjuangan kemerdekaan. PNI memandang perempuan sebagai agen penting dalam menanamkan semangat kebangsaan pada generasi muda, sekaligus pendorong semangat juang bagi suami mereka. Visi ini menunjukkan bahwa PNI memandang gerakan perempuan bukan sekadar perjuangan kesetaraan gender, tetapi sebagai bagian integral dari perjuangan kemerdekaan nasional.[25]

PNI mengembangkan strategi khusus dalam membangun jaringan pergerakan di kalangan buruh melalui pembentukan berbagai serikat pekerja yang berfungsi ganda sebagai wadah perjuangan ekonomi dan politik. Inisiatif dimulai dengan pendirian Persatoean Chauffeur Indonesia di Bandung dan Sarekat Anak Kapal Indonesia di Tanjung Priok, yang kemudian berkembang pesat dengan munculnya serikat-serikat buruh bercorak nasionalis di berbagai sektor. Di Surabaya, PNI membentuk Persatoean Djongos Indonesia (P.D.I.) untuk pekerja rumah tangga dan O.J.S. Bond Indonesia bagi karyawan perusahaan trem uap Jawa Timur. Berbagai organisasi ini menunjukkan pendekatan inklusif PNI dalam menjangkau berbagai lapisan pekerja, sekaligus memperkuat basis massa partai di kalangan proletariat.[26]

Melalui strategi tiga pilar ini (pemuda, perempuan, dan buruh), PNI berhasil menciptakan jaringan pergerakan yang komprehensif dan saling terkait, yang menjadi fondasi penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pendekatan holistik ini tidak hanya memperluas pengaruh politik PNI, tetapi juga berhasil menciptakan kesadaran nasional yang mendalam di berbagai lapisan masyarakat.

6. Surat Kabar Persatoean Indonesia

Kongres pertama PNI yang diselenggarakan di Surabaya pada tahun 1928 menghasilkan keputusan penting, yaitu penerbitan surat kabar resmi partai bernama

---

[22] Abdul Rahman Momon, *Sumpah Pemuda Latar Sejarah Dan Pengaruhnya Bagi Pergerakan Nasional* (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Peristiwa Museum Sumpah Pemuda, 2008), 45.

[23] Surat Kabar Persatoean Indonesia, "Kongres Pemoeda-Pemoeda Indonesia Jang Diadakan Dikota Jacatra Pada Tanggal 27-28 October 1928," Lembar kedua 1928.

[24] Momon, *Sumpah Pemuda Latar Sejarah Dan Pengaruhnya Bagi Pergerakan Nasional.*

[25] Surat Kabar Persatoean Indonesia, "Kongres Kaoem Isteri Indonesia," 1928.

[26] Blumberger, *De Nationalistische Beweging In Nederlandsch Indie*.

Persatoean Indonesia. Nama ini dipilih secara sengaja untuk mencerminkan semangat persatuan yang tengah menguat di kalangan pergerakan nasional. Dalam edisi perdananya, surat kabar ini menegaskan bahwa namanya mencerminkan "*kemaoean zaman*", yakni sebuah era di mana semangat persatuan telah tertanam kuat dalam hati rakyat Indonesia.[27]

Pada awalnya kantor redaksi Persatoean Indonesia beralamat di Pintoe Ketjil No. 46, Batavia. Namun, pada Juni 1929 kantor tersebut dipindahkan ke Gang Kenari, Weltevreden. Surat kabar ini dipimpin oleh dua tokoh utama PNI, yakni Soekarno dan Soenarjo, yang bertindak sebagai redaktur, sementara urusan administrasi dipercayakan kepada Sartono. Lebih dari sekadar media informasi, Persatoean Indonesia berfungsi sebagai alat perjuangan untuk menyebarluaskan gagasan-gagasan PNI serta menyalurkan aspirasi rakyat yang mendambakan kemerdekaan.

Sebagai media pergerakan nasional, Persatoean Indonesia aktif mengkritik kebijakan pemerintah kolonial dan secara rutin memberitakan berbagai kegiatan PNI serta organisasi pergerakan lainnya.[28] Surat kabar ini juga kerap meliput perkembangan PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) dan PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia), serta konsisten menyuarakan semangat persatuan dan perlawanan terhadap penjajahan.[29]

Tidak hanya berfokus pada isu-isu nasional, Persatoean Indonesia juga memberikan perhatian terhadap perkembangan internasional yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan. Surat kabar ini sering melaporkan aktivitas Perhimpunan Indonesia di Eropa, serta memuat pemikiran tokoh-tokoh seperti Mohammad Hatta mengenai pentingnya persatuan dalam melawan kolonialisme.[30]

Pada bidang ekonomi, Persatoean Indonesia turut berkontribusi dalam membangun kemandirian bangsa dengan mempromosikan usaha-usaha milik pribumi. Surat kabar ini secara rutin mengiklankan toko batik, pabrik peci, hotel milik Muhammadiyah, dan mendukung perbankan nasional. Dengan demikian, Persatoean Indonesia tidak hanya menjadi media propaganda politik, tetapi juga turut andil dalam membangun fondasi ekonomi yang kuat bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia.[31]

Dampak Politik Inklusif

Partai Nasional Indonesia (PNI) sejak awal kelahirannya telah membawa semangat persatuan dalam perjuangan nasional. Dalam situasi gerakan yang terbelah oleh perbedaan ideologi, PNI justru memprakarsai lahirnya wadah persatuan bernama Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). Gagasan ini lahir dari kesadaran bahwa kemerdekaan tidak mungkin diraih secara terpisah. Maka, pada akhir tahun 1927, tokoh-tokoh dari berbagai organisasi seperti Sarekat Islam, Budi Utomo, Kaum Betawi, dan organisasi pemuda lokal

[27] Surat Kabar Persatoean Indonesia, "Kata Pendaholoean," 1928.

[29] Surat Kabar Persatoean Indonesia, "Congres PPPKI," 1928.

[30] Terbit Doea and A L I Sedoe La, "Mohammad Hatta Stokvis Nationalist Indonesia Social Democraat," no. 79 (1928).

[31] Surat Kabar Persatoean Indonesia, "Promosi Toko-Toko Milik Pribumi Selalu Muncul Pada Surat Kabar PNI Setelah Memberitakan Topik Utama," 1928-1932.

berkumpul membentuk PPPKI, dengan PNI sebagai penggerak utamanya.[32] Dalam forum-forum PPPKI, Soekarno aktif menyuarakan pentingnya kerja sama lintas kelompok. Ia menekankan bahwa nasionalisme, islamisme, dan sosialisme harus mampu berjalan beriringan demi kemerdekaan. Pendekatan tersebut menjadikan politik inklusif sebagai praktik nyata, bukan sebatas jargon: kolaborasi antargolongan menjadi pondasi perjuangan melawan penjajahan.[33]

Keberhasilan PNI dalam menggerakkan massa dan membangun jaringan politik yang luas justru menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemerintah kolonial Belanda. Pengaruh yang meluas, terutama melalui rapat umum dan media partai seperti Persatoean Indonesia, mendorong pemerintah mengambil langkah represif. Mulai tahun 1928, berbagai pembatasan diberlakukan terhadap pidato, termasuk pelarangan penggunaan kata "*merdeka*".[34] Aparat mulai mencatat setiap kegiatan rapat umum PNI, dan intervensi langsung dilakukan ketika propaganda dianggap terlalu tajam.

Ketakutan penguasa kolonial memuncak ketika jumlah anggota PNI terus meningkat di kota-kota besar seperti Bandung, Batavia, dan Surabaya. Pidato Soekarno yang menyinggung bahaya perang Pasifik dan mengaitkannya dengan kebangkitan nasional dianggap sebagai ancaman subversif.[35] Akhir Desember 1929 pemerintah kolonial melancarkan operasi besar-besaran: kantor-kantor PNI digeledah, para tokohnya ditangkap, serta dokumen-dokumen partai disita di berbagai wilayah.[36]

Tindakan represif mencapai puncaknya saat Soekarno bersama tokoh-tokoh penting PNI lainnya seperti Gatot Mangkupraja, Maskoen, dan Soepriadinata ditangkap. Mereka dijerat pasal-pasal hukum pidana kolonial yang mengarah pada tuduhan konspirasi dan upaya menggulingkan kekuasaan. Sidang di Landraad Bandung yang dimulai pada Agustus 1930 menjadi momen politik penting.[37]

Dalam pembelaannya, Soekarno menegaskan bahwa perjuangan PNI tidak dimaksudkan untuk menciptakan kekacauan, melainkan bentuk kesadaran politik rakyat dalam menuntut hak-haknya secara sah. Ia membela prinsip nonkooperatif dan menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia harus diperjuangkan tanpa kekerasan, melalui mobilisasi massa dan peningkatan kesadaran nasional. Meskipun pembelaan tersebut menyentuh banyak kalangan, pengadilan kolonial tetap menjatuhkan hukuman berat. Soekarno divonis empat tahun penjara, disusul hukuman bagi para pemimpin lainnya.[38]

Penahanan Soekarno dan rekan-rekannya menjadi pukulan telak bagi PNI. Ketiadaan tokoh utama serta bayang-bayang penangkapan lanjutan menyebabkan partai mengalami disorientasi. Mr. Sartono sebagai pelaksana tugas ketua partai menggelar Kongres Luar Biasa pada April 1931.[39] Kongres yang berlangsung dalam

---

[32] Suwardi Edy, *Soetomo Dan Perjuangannya* (Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional, 2011), 6.

[33] Soekarno, *Nasionalisme,_Islamisme,_dan_Marxisme.Pdf*.

[34] adams Cindy, Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia (Jakarta: Gunung Agung, 1965), 48.

[35] Blumberger, *De Nationalistische Beweging In Nederlandsch Indie*.

[36] Cindy, Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat Indonesia, 49.

[37] Blumberger, *De Nationalistische Beweging In Nederlandsch Indie*.

[38] Surat Kabar Persatoean Indonesia, "Nasib PNI Dan Ke-Empat Pemimpinnja Oleh Landraad Bandoeng Pada 22 December 1930," 1930.

[39] John, *Jalan Ke Pengasingan;Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*.

suasana penuh tekanan itu menghasilkan keputusan untuk membubarkan PNI. Keputusan ini menimbulkan kekecewaan di kalangan kader dan simpatisan, karena banyak yang menilai suara akar rumput tak diikutsertakan. Namun bagi para pimpinan cabang, pembubaran merupakan bentuk tanggung jawab untuk menghindari korban lebih banyak akibat tindakan represif kolonial.[40]

Pasca pembubaran PNI medan perjuangan terbagi ke dalam berbagai jalur. Sartono dan kelompoknya membentuk Partai Indonesia (Partindo) yang tetap melanjutkan garis perjuangan PNI melalui aksi massa dan agitasi.[41] Di sisi lain, Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta mendirikan PNI Baru yang lebih menekankan pendidikan politik dan kaderisasi. Keduanya meyakini bahwa perjuangan memerlukan pemahaman ideologis yang matang agar tidak terulang kegagalan. PNI Baru menyasar rakyat biasa melalui pendidikan politik, kursus, dan publikasi seperti Daulat Ra'jat. Meski memiliki strategi berbeda, Partindo dan PNI Baru tetap mewarisi semangat inklusif PNI: menolak kolonialisme dan memperjuangkan kemerdekaan seluruh bangsa Indonesia tanpa memandang kelas, agama, atau golongan.[42]

Perjuangan melawan kolonialisme juga dilanjutkan dari dalam parlemen kolonial melalui Fraksi Nasional yang dipimpin Mohammad Husni Thamrin. Fraksi ini gencar menyuarakan penolakan terhadap tindakan represif pemerintah dan memperjuangkan kemerdekaan lewat jalur hukum dan politik. Kritik tajam Thamrin di Volksraad terhadap penggeledahan rumah para pemimpin PNI menjadi bukti bahwa perlawanan juga hadir dalam ruang formal, bukan hanya di jalanan.[43]

Dengan demikian meskipun secara organisatoris PNI dibubarkan, warisan perjuangan politik inklusif yang ditanamkannya justru terus tumbuh dalam berbagai bentuk. Ide persatuan yang melampaui batas kelompok dan ideologi telah menjadi fondasi kokoh bagi gerakan nasional Indonesia. Baik melalui Partindo, PNI Baru, maupun Fraksi Nasional, semangat perjuangan tetap hidup dan menyatu dalam satu cita-cita besar: Indonesia Merdeka. Sejarah pun mencatat bahwa sekalipun organisasi bisa dibungkam, semangat dan cita-cita tidak akan pernah padam.

D. KESIMPULAN

Artikel ini mengkaji peran Partai Nasional Indonesia (PNI) dalam membangun gerakan nasional anti-kolonial melalui pendekatan politik inklusif pada periode 1928–1931. PNI muncul sebagai respons terhadap fragmentasi gerakan kebangsaan yang terpecah oleh perbedaan ideologi, kelas sosial, dan etnis. Dengan landasan pemikiran Soekarno yang memadukan nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, PNI berhasil menciptakan strategi perjuangan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kalangan intelektual, buruh, perempuan, hingga pemuda.

Implementasi politik inklusif PNI tercermin melalui berbagai kegiatan, seperti pembentukan cabang-cabang partai di daerah, gerakan boikot terhadap lembaga kolonial, penyelenggaraan rapat umum dan propaganda, program pendidikan politik, serta kolaborasi dengan elemen-elemen pergerakan nasional lainnya. Surat kabar

[40] John.

[41] "Surat Kabar Daulat Ra'jat," 1931.

[42] Universitas Sebelas and Maret Surakarta, "Menanamkan Nilai Persatuan Dan Kesatuan Melalui Pembelajaran Sejarah" 02, no. 1 (2021): 43, https://doi.org/10.24042/jhcc.v2i1.6486.

[43] Widyarsono Toto, *Cahaya Di Batavia MH Thamrin Dan Gerakan Nasionalis Kooperasi Di Indonesia 1927-1941* (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2009), 45.

Persatoean Indonesia menjadi media penting dalam menyebarkan gagasan persatuan dan memobilisasi dukungan rakyat.

Dampak dari pendekatan inklusif PNI terlihat dari terbentuknya federasi politik seperti PPPKI, yang memperkuat solidaritas antarkelompok, serta respons represif pemerintah kolonial yang menganggap PNI sebagai ancaman. Meskipun PNI akhirnya dibubarkan pada tahun 1931, warisan politik inklusifnya terus hidup melalui partai-partai penerus seperti Partindo dan PNI Baru, serta semangat persatuan yang menjadi fondasi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Dengan demikian penelitian ini menunjukkan bahwa politik inklusif PNI bukan hanya strategi jangka pendek, melainkan fondasi kokoh bagi gerakan kebangsaan yang inklusif, egaliter, dan berorientasi pada kemerdekaan sejati. Pendekatan ini menjadi bukti historis bahwa persatuan di atas perbedaan adalah kunci utama dalam melawan kolonialisme dan mewujudkan cita-cita Indonesia Merdeka.

E. REFERENSI

Baharun, Hasan, and Robiatul Awwaliyah. "Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Epistemologi Islam." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 5, no. 1 (2018): 57–71.

Blumberger, J.Petrus. *De Nationalistische Beweging In Nederlandsch Indie*. Hollad: Foris Publication, 1987.

Budiharja, Agus Sulistiya, Muri Kurniawati, Haris Budiharo, and Amin Suktilah. *"BUDI UTOMO: SJARAH DAN KONGRES PERTAMA DI YOGYAKARTA 1908",SEBUAH KAJIAN KOLEKSI MUSEUM BENTENG VREDERBUG YOGYAKARTA",*. Yogyakarta: Museum Benteng Vredebrug Yogyakarta, 2004.

Cindy, Adams. *BUNG KARNO PENJAMBUNG LIDAH RAKJAT INDONESIA*. Jakarta: Gunung Agung, 1965.

Doea, Terbit, and A L I Sedoe La. "Mohammad Hatta Stokvis Nationalist Indonesia Social Democraat," no. 79 (1928).

Edy, Suwardi. *Soetomo Dan Perjuangannya*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional, 2011.

Gouverneur-, Zijne Excollontio Den. "Afschrift, Parket van Den Procureur-Generaal, No. 2339/AP, Weltevreden, 22 Desember 1928, SPOED, Onderwerp: GEHEIM - EIGENHANDIG, Cursus-En Ledenvergaderingen Der PNI," 1928.

Indonesia, Surat Kabar Persatoean. "Congres PPPKI," 1928.

———. "Kata Pendaholoean," 1928.

———. "Kongres Kaoem Isteri Indonesia," 1928.

———. "Kongres Pemoeda-Pemoeda Indonesia Jang Diadakan Dikota Jacatra Pada Tanggal 27-28 October 1928," 1928.

———. "Nasib PNI Dan Ke-Empat Pemimpinnja Oleh Landraad Bandoeng Pada 22 December 1930," 1930.

———. "Promosi Toko-Toko Milik Pribumi Selalu Muncul Pada Surat Kabar PNI Setelah Memberitakan Topik Utama," n.d.

Indonesia, Tim Penulisan Searah Nasional. *Sejarah Nasioal Indonesia; Zaman Kebangkitan Nasional Dan Masa Hindia Belanda*. Edisi Ketu. Jakarta: Balai Pustaka, 2019.

John, Ingleson. *Jalan Ke Pengasingan;Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*.

Cetakan Ke. Jakarta: LP3S Anggota IKPI, 1988.
Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonilaisme Sampai Nasionalisme*. Jilid 2. Jakarta: Gramedia, 1993.
Kholid, Mawardi, and Hidayat Imam. *Relasi Sosial Politik Nahdlatul Ulama*. Cetakan I. Jawa Tengah: Rizquna Anggota IKAPI, 2023.
Momon, Abdul Rahman. *Sumpah Pemuda Latar Sejarah Dan Pengaruhnya Bagi Pergerakan Nasional*. Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Peristiwa Museum Sumpah Pemuda, 2008.
Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. *Yogyakarta Press*, 2020.
Padiatra, Aditia Muara. *Ilmu Sejarah; Metode Dan Praktik*. Gresik: JSI Press, 2020.
Perdana, Yusuf, and Adi Rinaldo Pratama. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. *Lakeisha*, 2022.
Sartono. MA'LOEMAT Kepada Ra jat pendoedoek Jacatra dan sekelilingnja Dari Pengoeroes PNI TJABANG JACATRA (1930).
Sebelas, Universitas, and Maret Surakarta. "Menanamkan Nilai Persatuan Dan Kesatuan Melalui Pembelajaran Sejarah" 02, no. 1 (2021): 37–50. https://doi.org/10.24042/jhcc.v2i1.6486.
Soekarno, Ir. *Nasionalisme,_Islamisme,_dan_Marxisme.Pdf*. Djakarta: Jajasan Pembaruan, 1963.
"Surat Kabar Daulat Ra'jat," 1931.
Toto, Widyarsono. *Cahaya Di Batavia MH Thamrin Dan Gerakan Nasionalis Kooperasi Di Indonesia 1927-1941*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2009.
Wattimena, Reza A.A. "Politik Progresif Inklusif Sebuah Teori." *RumahFilsafat.Com*, no. April (2024).
Wayan, Pardi, Lasmana Wayan, Sustra Wayan, and Tungga Atmadja Anantawikrama. "REKONSTRUKSI PEMIKIRAN-PEMIKIRAN SUKARNO TENTANG TOLERANSI TAHUN 1926-1966 DAN RELEVANSINYA PADA MASYARAKAT INDONESIA DI ERA ABAD XXI." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 09 (2023).